

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara garis besar, kondisi ekonomi makro nasional tahun 2012 dan perkiraannya pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Pertama, stabilitas ekonomi sepanjang tahun 2012 terjaga di dalam proses pemulihan ekonomi dunia. Dalam tahun 2012, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.096 per dolar AS atau menguat 0,99 persen dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya serta cadangan devisa mencapai USD 110,1 miliar 96,2 miliar, naik USD 13,9 miliar dibandingkan tahun 2010 sebesar 96,2 miliar. Laju inflasi pada tahun 2011 sebesar 3,79 persen atau turun sebesar 3,21 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 7,0. Dalam tahun 2011, stabilitas ekonomi diupayakan tetap terjaga dihadapkan resiko eksternal terutama dari potensi krisis utang Eropa yang masih besar, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah, resiko terkait dengan perubahan iklim global, serta dampak dari memanasnya hubungan antara Amerika dengan Iran.

Kedua, ekonomi Nasional dalam tahun 2011 tumbuh mencapai 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2010 (6,1 persen) dan merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi yang meningkat, kemampuan ekspor barang dan jasa yang membaik, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Dalam keseluruhan tahun 2011, Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 10,7 persen dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalan 1,4 persen. Sementara PDB (tidak termasuk migas) tahun 2011 tumbuh 6,9 persen..

Ketiga, kualitas pertumbuhan ekonomi membaik dengan terjaganya stabilitas dan momentum pertumbuhan. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 12,3 persen dibandingkan lima tahun lalu yang masih mencapai 16,6 persen. Tingkat pengangguran untuk tahun 2011 juga telah berhasil ditekan menjadi

6,6 persen. Di tahun 2012 di upayakan ditekan lagi menjadi 5 persen. Dalam tahun 2013, kualitas pembangunan diupayakan lebih baik.

Memasuki kuartal pertama 2012, berbagai indikator ekonomi di daerah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Secara keseluruhan, perkembangan ini menguatkan prakiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih dapat tumbuh tinggi sekitar 6,5%, terutama didukung oleh aktivitas domestik yang masih kuat di berbagai daerah. Perekonomian Jawa dan Jakarta diperkirakan masih tumbuh di atas 6% di tengah kecenderungan perlambatan ekspor manufaktur akibat melemahnya permintaan global.

Di sisi inflasi, perkembangan di berbagai daerah pada akhir triwulan I 2012 cenderung mulai menunjukkan adanya peningkatan. Realisasi inflasi yang terjadi pada akhir triwulan I 2012 di hampir seluruh wilayah cenderung lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terutama dipicu oleh kenaikan harga sembako yang cukup signifikan karena berkurangnya pasokan dan tertahannya penurunan harga beras karena bergesernya waktu puncak panen raya. Selain itu, ekspektasi masyarakat terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan turut memengaruhi perkembangan harga di akhir triwulan I 2012.

Ke depan, prospek ekonomi di daerah akan dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global yang hingga saat ini belum menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Hal ini menjadi faktor risiko yang dapat menurunkan kinerja ekspor daerah. Berbagai informasi yang dihimpun dari kalangan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya mengindikasikan kekhawatiran dunia usaha terhadap kondisi ketidakpastian permintaan ekspor dapat terjadi hingga akhir 2012. Meski demikian, kuatnya permintaan domestik dan persepsi terhadap iklim investasi nasional menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal agar perekonomian nasional tetap dapat tumbuh tinggi. Hal lain yang perlu dicermati adalah meningkatnya intensitas permasalahan terkait penetapan upah minimum, terutama di daerah basis industri, yang perlu segera di atasi agar prospek iklim usaha tetap positif.

Sejumlah faktor risiko juga diperkirakan membayangi perkembangan harga di berbagai daerah. Hal ini antara lain terkait rencana kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan rencana penerapan kebijakan pengendalian impor hortikultur. Mencermati berbagai risiko tersebut, langkah penguatan komunikasi kebijakan

melalui forum koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi sangat penting untuk meredam eskalasi ekspektasi inflasi masyarakat. Selain itu, langkah tersebut perlu disertai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan dan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok dan BBM bersubsidi.

Selengkapnya, untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2010 – 2014 di jelaskan dalam Tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1

PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2010-2014 (dalam persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata 2010-2014
PERTUMBUHAN EKONOMI	5,5-5,6	6,0-6,3	6,4-6,9	6,7-7,4	7,0-7,7	6,3-6,8
SISI PENGELUARAN						
Konsumsi Masyarakat	5,3-5,4	5,3-5,4	5,4-5,5	5,4-5,5	5,4-5,5	5,4-5,5
Konsumsi Pemerintah	9,3-9,7	10,2-10,5	10,3-11,0	8,9-9,1	8,9-9,1	9,5-9,9
Investasi	7,2-8,6	8,2-10,9	8,4-11,6	10,2-12,0	11,7-12,6	9,1-11,1
Ekspor Barang dan Jasa	5,1-6,1	10,2-11,7	11,5-12,3	12,2-14,5	13,2-16,5	10,4-12,2
Impor Barang dan Jasa	7,2-8,2	12,3-15,2	12,8-15,3	16,5-18,7	17,4-20,1	13,2-15,5
SISI PRODUKSI						
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,6-3,7	3,6-3,7	3,7-3,8	3,8-3,9	3,8-3,9	3,7-3,8
Pertambangan dan Penggalian	2,1-2,2	2,1-2,2	2,2-2,3	2,3-2,4	2,3-2,4	2,2-2,3
Industri Pengolahan	4,1-4,2	5,2-5,7	5,9-6,3	6,1-6,8	6,1-7,2	5,5-6,0
Industri Bukan Migas	4,6-4,7	5,8-6,4	6,5-7,0	6,8-7,5	7,1-7,8	6,1-6,7
Listrik, Gas dan Air	11,2-11,4	11,7-11,9	12,6-12,8	13,8-14,0	14,6-14,8	12,8-13,0
Konstruksi	6,9-7,0	7,4-7,5	7,5-8,0	7,7-8,5	7,9-8,9	7,5-8,0
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,5-6,6	6,8-6,9	7,1-7,7	7,3-8,0	7,5-8,2	7,0-7,5
Pengangkutan dan Telekomunikasi Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	12,7-12,8	12,9-13,0	13,2-13,9	13,4-15,6	13,8-15,8	13,2-14,2
Jasa-jasa	5,5-5,7	5,8-6,9	5,8-7,0	6,3-7,0	6,7-7,0	6,2-6,7
	5,4-5,5	5,5-5,7	5,9-6,4	6,1-6,6	6,3-6,6	5,8-6,2

Sumber: RPJMNas 2009-2014

Gambaran beberapa indikator kinerja utama provinsi Jawa Timur, dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama, Kinerja Ekonomi yang diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2011 mencatat pertumbuhan sebesar 7,22persen dan diatas nasional sebesar 6,5 persen. Pertumbuhan tahun 2011ini lebih cepat dari tahun 2010 yang mencapai 6,68 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB). Dari sisi penawaran, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, serta sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Jatim. Inflasi Jawa Timur (Jatim) yang dihitung berdasarkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan IV-2011 sebesar 0,92% atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,05%. Secara tahunan, realisasi inflasi tersebut menutup inflasi di tahun 2011 menjadi sebesar 4,29% atau berada pada batas bawah rentang sasaran inflasi nasional 2011 ($5\% \pm 1\%$). Penurunan inflasi pada periode laporan terkait dengan kembali normalnya tekanan permintaan pasca periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1432H yang berlangsung pada triwulan III-2011, serta didorong oleh pelemahan harga beberapa komoditas strategis internasional, sehingga mengurangi tekanan dari sisi eksternal/ imported inflation.

Tahun 2012, dengan asumsi makro ekonomi yang stabil maupun asumsi kondisi politik dalam negeri kondusif, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di targetkan tumbuh lebih cepat sebesar 7,5-7,7 prosen. Target pertumbuhan ini tidak serta merta fokus pada pencapaian besaran target, namun lebih kedalam kualitas pertumbuhan baik menyangkut distribusi pendapatan maupun struktur penggunaan yang dirancang untuk terus meningkatnya investasi dan net ekspor.

Sedangkan Tahun 2013 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Jawa timur akan menggeser kota Jakarta yang selama ini dikenal memiliki pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jatim hanya memiliki sedikit selisih angka dengan Jakarta. Adapun tiga provinsi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta sebesar 16,5 persen, Jawa Timur sebesar 14,7 persen dan Jawa Barat sebesar 14,3 persen. Tingginya sumbangsih dari Jakarta untuk rata-rata nasional, dikarenakan jumlah penduduk Jawa Timur jauh lebih besar daripada Jakarta yakni 37 juta. Menurut perhitungan standar internasional keputusan Menpan No. 9 tahun 2007,

indeks pengukuran kinerja ada 5, di antaranya pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, disparitas dan indeks pembangunan manusia. Menurut indeks pengukuran kinerja, suatu wilayah dinyatakan gagal jika kinerja tumbuh tetapi ada kemiskinan, tidak menyerap tenaga kerja atau disparitas antar daerah masih tinggi. Mengenai disparitas, Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa wilayah di antaranya Banyuwangi, Jombang, dan Malang. Perkembangan baru juga terjadi di Tuban, Gresik, Lamongan dan Probolinggo. Dalam upaya mencapai target menggeser posisi Jakarta pada 2013, Pemprov Jatim terus mengupayakan peningkatan dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi prioritas. Selama ini, sektor koperasi dan UMKM memegang peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi dengan menyumbang sekitar 53,82% terhadap PDRB Jawa Timur.

Kedua, Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan capaian kinerja pembangunan manusia dari instrumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,62 dari tahun 2010 menjadi 72,15 tahun 2011. Sedangkan pada tahun berjalan 2012 dengan desain RKPD 2012 sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2010, pada akhir 2012 diperkirakan IPM akan tercapai pada posisi 72,65. Dan pada Rancangan RKPD 2013, IPM ditargetkan sebesar 73,0 – 73,15.

Ketiga, Penurunan Kemiskinan yang diukur dengan prosentase penurunan penduduk miskin. kinerja penurunan kemiskinan yang pada tahun 2011 turun menjadi 14,23 persen dari tahun 2010 sebesar 15,26 persen. Selanjutnya dengan sinergi program antara Pemerintah melalui PNPM, Pemerintah Provinsi dengan Jalinkesra Rumah Tangga Sangat Miskin serta Program-program penanganan kemiskinan dari Kabupaten/Kota maupun partisipasi masyarakat, pada akhir 2012 diperkirakan jumlah penduduk miskin pada kisaran 13,75% - 14,25%. Sedangkan pada Rancangan RKPD 2013 penduduk miskin Jawa Timur diperkirakan akan turun menjadi 11,00%-12,00%.

Keempat, Penurunan Pengangguran yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kinerja TPT terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 TPT pada posisi 5,08%, mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi menjadi 4,91 persen pada posisi Februari 2010 dan pada posisi Agustus 2010 sebesar 4,25%. Pada tahun berjalan 2011, angka pengangguran terus turun menjadi 4,18% pada bulan Februari dan turun lagi menjadi 4,16% pada bulan

Agustus. Pada tahun 2012, angka pengangguran diprediksikan akan mampu mencapai 4,0 – 3,5% dan pada Rancangan RKPD 2013 ditargetkan sebesar 3,5-4,0%.

Kelima, Kesenjangan antar wilayah yang diukur dengan Indeks Disparitas Wilayah. Untuk melihat apakah pembangunan di Jawa Timur benar adanya dilihat dari keadilan terkait dengan pemerataan, dapat dilihat bahwa Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur pada tahun 2009 mencapai 115,86 sedangkan pada tahun 2010 disparitas wilayah semakin mengecil dan mencapai sebesar 115,1. pada tahun 2011 disparitas wilayah semakin mengecil dan mencapai sebesar 112,53. Dengan desain program yang berbasis wilayah khususnya pengembangan kawasan-kawasan, diperkirakan disparitas wilayah akan semakin kecil dan pada akhir 2012. Indeks Disparitas Wilayah akan mampu turun menjadi 112,3 Sedangkan pada Rancangan RKPD 2013, target Indeks Disparitas Wilayah akan turun menjadi 113,80-114,10.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 – 2014

no	Indikator Kinerja	2008		2009		Target Tahun 2010 - 2014				
		target	capaian	target	capaian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertumbuhan Ekonomi (%/th)	6.30	5.94	4.00-4.50	5.01	4.00-4.50	5.00-5.50 (6.13-6.75)	5.00-5.50	5.00-5.60	5.00-5.60 (7.10-7.80)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.60	6.42	6.20-6.40	5.08	6.00-6.20 (6.50-7.20)	5.80-6.00 (6.30-6.98)	5.60-5.80	5.40-5.60	5.20-5.40 (5.70-6.30)
3	Indeks Pembangunan Manusia	66.00	70.38	68.90-69.00	70.98	69.00-69.50	69.50-69.90	69.90-70.10	70.10-70.50	70.50-71.00
		RKP Nas 2011 menetapkan, AHH=71.4, Rata2 lama sekolah= 7.6 angka kematian bayi = 24								
		RPJM Prop Jatim 2009, AHH = 69.15, Rata2 lama sekolah = 7.07, Angka Kematian Bayi = 28 (2010=25), AKI(nas) = 224; (jatim) =118= MDGs; Pendapatan/Org/Bln = 1 US\$								
4	Angka Kemiskinan (%)	15.90	18.51	16.50-16.90	16.68	15.40-16.50 (14.62-14.24)	15.40-16.50 (13.77-13.42)	14.50-15.00	14.00-14.50	13.50-14.00 (11.23-10.95)
5	Indeks Disparitas Wilayah	101.00	115.96	115.1-115.3	116.02	114.7-115.1	114.4-114.7	114.1-114.4	113.8-114.1	113.5-113.8

Sumber :

- RPJMD Prov Jatim 2009-2014
- BPS Prov Jatim
- Bappeda Prov Jatim (dan diolah)

TABEL 3.3
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN TARGET 2012-2013

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2011		2012	2013	KET
					TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	
1	Meningkatnya perekonomian daerah	1	PDRB Harga Berlaku	Juta Rp	18,226,500.00	17,331,080.00	20,989,000.00	24,170,000.00	
		2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.44	6.23	6.65	6.85	
		3	PDRB Perkapita	Rp	16,092,500.00	15,721,005.99	18,318,000.00	20,850,000.00	
		4	Pengembangan Usaha Sektor Riil						
		a.	Volume Usaha Koperasi	Ribu Rp	334,326,000.00	368.595.000,00	351,042,500.00	368,595,000.00	
		b.	Investasi Sektor Industri	Ribu Rp	281,000.00	283.000,00	282,000.00	283,000.00	
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	1	Penanaman Modal Asing (PMA)	US \$	170,510,451.00	140.279.370,00	179,035,973.00	187,987,772.00	
		2	Penanaman Modal Dalam Negeri	Ribu Rp	334,890,593.00	578,677,000,000.00	351,635,123.00	369,216,879.00	
3	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan	1	Luas Lahan Yang Direhabilitasi	Ha	9,762.00	13,000.00	11,572.00	13,317.00	
		2	Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok (Beras)	Ton	197.22	221.53	216.94	238.64	
4	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai sosial dan agama	1	Indeks Pembangunan Manusia	Indek	62.49	63.67	62.83 dikoreksi menjadi (64.00 – 64.50)	63.18 dikoreksi menjadi (64.25- 64.75)	
		2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.85	0.52	0.8	0.75	
		3	Jumlah rumah tangga miskin	%	32	31.78 *	31 Angka Koreksi (28.00-27.00)	30.5 Angka Koreksi (26.00-25.00)	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1	Tingkat Tindak Lanjut Temuan LHP	LHP	100	100	100	100	
		2	Tingkat Penyelesaian Kasus	Kasus	100	100	100	100	

Sumber : 1. RPJMD Tahun 2008-2013

* Data Update PPLS 2008 Pada Tahun 2011

Sementara itu, secara makro kondisi Kabupaten Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, sesuai dengan RPJMD kabupaten Probolinggo Tahun 2008-2013, target pertumbuhan ekonomi kabupaten Probolinggo tahun 2011 sebesar 6,44% dan terealisasi sebesar 6,23%. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi target, hal ini disebabkan adanya erupsi gunung Bromo dan anomali cuaca dan bencana alam. Akan tetapi Kabupaten Probolinggo optimis bahwa pada tahun yang akan datang yaitu Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi akan membaik. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan target yaitu sebesar 6,65%, begitu pula dengan target tahun 2013 Kabupaten Probolinggo optimis terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 6,85%.

Kedua, Kinerja Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2011 target IPM Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 62,49, dan terealisasi sebesar 63,67. Pada tahun 2011 Target IPM telah tercapai, dan memenuhi harapan. Sedangkan pada Tahun 2012 target IPM diperkirakan sebesar 62,83, sehubungan dengan telah tercapainya IPM yang sudah melampaui target di Tahun 2012 maka untuk Tahun 2012 target IPM terdapat koreksi sebesar 64,00 – 64,50. Pada Tahun 2013 target IPM juga mengalami koreksi dimana target yang sebelumnya sebesar 63,18 dikoreksi menjadi sebesar 64,25 – 64,75.. Terdapatnya koreksi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja Kabupaten Probolinggo kearah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Ketiga, Jumlah rumah tangga miskin pada Tahun 2011 ditargetkan sebesar 32%. Sedangkan Tahun 2012 dan Tahun 2013 berturut-turut ditargetkan sebesar 31% dan 30,5%. Adapun pada Tahun 2011 ini sudah tercapai target sebesar 31,78%, mengingat target sudah tercapai maka akan dilakukan koreksi atas target Tahun 2012 yaitu sebesar 28,00 – 27,00% dan target Tahun 2013 adalah sebesar 26,00 – 25,00 %.

Keempat, PDRB Perkapita, pada tahun 2011 PDRB Perkapita Kabupaten Probolinggo tidak mencapai target, hal ini bisa diketahui dari target sebesar Rp.16,092,500.00 dan terealisasi sebesar Rp. 15,721,005.99. Akan tetapi Kabupaten Probolinggo merasa optimis bahwa ditahun-tahun yang akan datang PDRB Perkapita akan mengalami peningkatan, hal ini bisa diketahui dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 18,318,000.00 di Tahun 2012 dan Rp 20,850,000.00 di Tahun 2013.

Kelima PDRB Harga Berlaku, pada tahun 2011 PDRB Atas Harga Berlaku juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target sebesar Rp. 18,226,500.00 dan terealisasi sebesar Rp. 17,331,080.00. Akan tetapi untuk Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga memasang target yaitu sebesar Rp. 20,989,000.00 dan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 24.170.000,00.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan 2012 Serta Perkiraanannya Tahun 2013

Untuk menjelaskan bagaimana gambaran perekonomian di kabupaten Probolinggo pada kurun waktu dua tahun terakhir, maka dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Inflasi di Kabupaten Probolinggo dengan Propinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Secara umum pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari besarnya kontribusi Sektor pembangunan dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (*PDRB*) maupun Income Per Kapita. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2012 dan 2013

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perekonomian daerah

1. Keterbukaan arus informasi, menimbulkan pergeseran nilai dan norma pada masyarakat, baik yang bersifat positif, maupun negatif.
2. Perubahan tersebut juga mempengaruhi cara pandang, pola pikir, dan sikap mental masyarakat yang semakin dan terbuka dalam menyampaikan aspirasinya

3. Semakin kritis dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Tuntutan terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) mendorong daya inovasi dan kreativitas masyarakat

Pada tahun 2012 dan 2013, perekonomian daerah masih akan menghadapi banyak tantangan. Perkembangan perekonomian global yang cepat dan dinamis sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, regional dan daerah. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan yang memicu krisis ekonomi global telah memberikan tekanan pada perekonomian daerah sehingga mengganggu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang direncanakan. Kebijakan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat mendorong peningkatan laju inflasi, yang tidak saja membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, tetapi juga diperkirakan akan melemahkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan faktor dominan dalam menopang perekonomian. Dalam beberapa tahun ke depan, pengaruh eksternal tersebut diperkirakan masih akan mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

Selain itu secara eksternal pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga dihadapkan pada tantangan utama berupa kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah yang berkeadilan dengan semangat *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* serta tetap memperhatikan upaya percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kondisi ini tentunya membawa konsekuensi terkait dengan adanya upaya-upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar melalui peningkatan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pada sisi yang lain pemberlakuan ASEAN China Free Trade Agreement pada tahun 2010 serta rencana pemberlakuan Asean Korea-Free Trade Agreement dan Asean India-Free Trade Agreement juga memberikan tantangan yang tidak ringan pada tahun 2011 dan tahun 2012 mendatang. Hal ini terutama pada upaya peningkatan daya saing produk lokal dalam menghadapi persaingan dengan produk impor baik untuk barang maupun jasa.

Selain faktor eksternal, faktor internal juga menahan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi belanja daerah dan optimalisasi pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten oleh perbankan daerah. Rendahnya tingkat realisasi belanja daerah terutama disebabkan oleh faktor administrasi, disamping faktor hukum dan faktor gejolak ekonomi. Rendahnya realisasi belanja APBD juga akan menyebabkan tingginya posisi dana pemda yang disimpan di perbankan daerah.

Pada tahun 2012, kinerja perekonomian Kabupaten Probolinggo diperkirakan akan semakin membaik. Sektor pertanian diharapkan untuk mengalami peningkatan dengan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan di Kabupaten Probolinggo juga diprediksi mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kinerja perdagangan sebagai sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.

Pada aspek tingkat kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan pada tantangan masih relatif tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih berada pada angka di atas 20%. Selain itu belum optimalnya pengembangan budaya usaha pada masyarakat yang berimbas pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi yang ada sehingga tingkat daya beli masyarakat juga belum dapat meningkat secara signifikan. Namun demikian masih terdapat peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, melalui optimalisasi peran dan fungsi sektor-sektor lapangan usaha seperti pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan, yang selama ini menjadi pilar perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo agar benar-benar bisa menjadi lokomotif bagi sektor-sektor lainnya. Selain itu juga mengembangkan sektor-sektor yang potensial menjadi

mesin-mesin pertumbuhan baru bagi wilayah Kabupaten Probolinggo seperti sektor pangangkutan dan komunikasi serta Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan.

Kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan masih cukup prospektif pada tahun 2012 dan 2013 mendatang. Kondisi ini diindikasikan dengan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil serta kondisi politik serta situasi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif. Secara makro, pada tahun 2013 perekonomian wilayah Kabupaten Probolinggo ditargetkan tumbuh sebesar 6,5% dengan tingkat inflasi sebesar 6.00

Dengan proyeksi kondisi ekonomi makro tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama dengan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program-program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat sebagai sarana pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Probolinggo mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai berikut :

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Arah pengelolaan Pendapatan Daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*) dan upaya pencapaian kesejahteraan Masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya memperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkat dari Tahun ke Tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Kebijakan mengenai pendapatan daerah diharapkan untuk mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, atau membiayai belanja daerah.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pusat maupun propinsi, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring meningkatnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- a) Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatnya pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
- b) Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan daerah. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian nasional.

- c) Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- d) Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap obyek pajak dan retribusi.
- e) Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Dana Perimbangan

Pendapatan yang diperoleh dari Dana Perimbangan pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari *Revenue Sharing Policy*. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus adil, demokratis dan transparan. Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah :

- a) Pemerintah Daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.
- b) Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

Kebijakan Belanja Daerah

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pos belanja terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pos belanja daerah memprioritaskan terlebih pos belanja wajib dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

Dengan kata lain Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 s/d tahun 2013

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun2010	Realisasi Tahun2011	Target Tahun 2012	Tahun Berjalan 2012 Per Mei 2012	Proyeksi/Target Tahun 2013*)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	903,349,637,061.80	1,131,818,905,176.81	1,150,039,183,060.00	576,155,010,904.51	73,793,723,704,470.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46,027,958,091.80	72,205,969,202.81	70,908,006,900.00	36,541,253,395.51	73,793,723,704,470.00
4.1.01	Pajak Daerah	11,375,742,891.00	14,500,649,959.00	13,900,000,000.00	6,444,398,749.00	15,290,000,000,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	22,070,122,237.21	37,232,910,509.78	17,669,346,500.00	7,439,270,563.76	18,230,326,895,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Pekayaan Daerah yg Dipisahkan	4,776,287,156.05	8,180,781,027.47	8,180,781,000.00	8,280,095,480.83	8,180,781,027,470.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,805,805,807.54	12,291,627,706.56	31,157,879,400.00	14,377,488,601.92	32,092,615,782,000.00
4.2	DANA PERIMBANGAN	675,246,654,404.00	774,130,367,905.00	907,581,408,000.00	423,792,879,040.00	#
4.2.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57,775,366,404.00	59,781,372,905.00	69,339,009,000.00	20,006,229,040.00	#
4.2.02	Dana Alokasi Umum	568,850,488,000.00	638,828,595,000.00	761,569,639,000.00	380,784,822,000.00	#
4.2.03	Dana Alokasi Khusus	48,620,800,000.00	75,520,400,000.00	76,672,760,000.00	23,001,828,000.00	#
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182,075,024,566.00	285,482,568,069.00	171,549,768,160.00	115,820,878,469.00	#
4.3.01	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	40,860,939,954.00	904,175,000.00	0,00	-	#
4.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	84,613,417,428.00	61,251,534,161.00	0,00	18,176,019,985.00	#
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56,600,667,184.00	172,322,514,160.00	112,631,518,160.00	56,090,270,000.00	#
4.3.05	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	0,00	51,004,344,748.00	58,918,250,000.00	41,554,588,484.00	#
TOTAL PENDAPATAN		903,349,637,061.80	1,131,818,905,176.81	1,150,039,183,060.00	405,145,108,932.90	576,155,010,904.51

*) Sumber Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

#) Proyeksi target Tahun 2013 untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum dapat di tentukan, menunggu keputusan dari Gubernur Jatim.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan dan berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, system dan mekanisme APBD menggunakan system anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi terhadap struktur belanja daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Pennggunaan anggaran Tahun 2013 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo serta daiarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertakan tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan masyarakat. Sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur public yang memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 s/d Tahun 2013

No	Uraian	Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun Berjalan Per Mei 2012	Proyeksi Tahun 2013
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	861.294.887.451,37	1.112.595.892.782,20	1.276.919.162.160,00	356,184,191,827.70	1.427.500.000.000,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	616.398.433.764,42	685.297.941.491,82	766.537.825.760,00	262,383,780,703.66	827.500.000.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai	502.003.829.532,60	559.880.233.534,00	619.305.317.760,00	221,677,973,514.66	700.000.000.000,00
5.1.3	Belanja Bunga	409.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	6.328.057.355,00	10.010.699.000,00	44.664.972.000,00	14,015,725,300.00	25.000.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	42.491.128.816,82	43.413.316.131,43	27.602.160.000,00	673,200,000.00	20.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab./Kota & Pemdes	100.000.000,00	256.669.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7	Belanja Bant.Kuangan Kpd Prov/Kab/Kota & Pem.Des	61.522.381.000,00	66.142.865.426,39	67.965.376.000,00	22,517,740,389.00	75.000.000.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.952.628.000,00	5.594.158.400,00	7.000.000.000,00	3,499,141,500.00	7.500.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	244.896.453.686,95	427.297.951.290,38	510.381.336.400,00	93,800,411,124.04	600.000.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	33.883.191.800,00	43.881.437.243,00	53.700.878.000,00	9,474,171,100.00	50.000.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.992.068.640,00	157.834.177.558,38	182.565.083.600,00	45,146,983,045.04	250.000.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal	100.021.193.246,95	225.582.336.489,00	274.115.374.800,00	39,179,256,979.00	300.000.000.000,00

*) Data dari DPKD

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penerimaan daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran daerah, antara lain, Pembentukan dana cadangan; Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 s.d Tahun 2013

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Tahun Berjalan 2012	Proyeksi Tahun 2013
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN	77,109,875,611.62	129,700,642,211.72	101,868,534,100.00	97,300,000,000.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	70,636,645,611.62	105,730,642,211.72	92,843,534,100.00	78,000,000,000.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	65,181,138,702.62	101,022,503,112.84	74,036,034,100.00	75,000,000,000.00
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	0.00	0.00	15,000,000,000.00	0.00
3.1.3	Penerimaan dari Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Hasil Pengembalian Pinjaman/Modal dari Pihak ke III	5,455,506,909.00	4,708,139,098.88	3,807,500,000.00	3,000,000,000.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	6,473,230,000.00	23,970,000,000.00	9,025,000,000.00	19,300,000,000.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	15,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (saham)	6,450,000,000.00	2,725,000,000.00	2,725,000,000.00	3,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo	23,230,000.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III	0.00	6,245,000,000.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00

*) Sumber DPPKD

